



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

| | |
|----------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2015 – 2016. |
| Masa Persidangan ke- | : I (satu). |
| Sifat Rapat | : Terbuka. |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Dengan | : Pejabat Eselon I Kemenpar RI. |
| Hari/Tanggal | : Senin, 21 September 2015. |
| Pukul | : 10.40 – 20.00 WIB. |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI. |
| Pimpinan Rapat | : Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPR RI. |
| Sekretaris Rapat | : Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPRRI. |
| Acara | : 1. Pembahasan RKA K/L 2016; 2. Lain-lain. |
| Hadir | : 34 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI. |
| Hadir Pemerintah | : 1. Sekretaris Kemenpar RI; 2. Inspektur Kemenpar RI; 3. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian RI; 4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian RI; 5. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian RI; 6. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian RI; |

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.40 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, M.T., setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Para Pejabat Eselon I Kemenpar RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI belum menyetujui usulan program dan postur anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 yang diusulkan oleh masing-masing satker di Kemenpar RI yaitu:

| No | Satker | Program | Pagu |
|--------------|--|---|--------------------------|
| 1 | Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata | 388.994.697.000 |
| 2 | Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara | Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara | 3.525.000.000.000 |
| 3 | Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara | Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara | 929.827.981.000 |
| 4 | Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan | Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan | 443.817.931.000 |
| 5 | Sekretariat Kementerian | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 355.686.799.000 |
| Total | | | 5.643.327.408.000 |

2. Merujuk realisasi kinerja tahun 2015 (per Agustus), dan rencana kegiatan pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara TA 2016, baik dari sisi fungsi dan kegiatan, Komisi X DPR RI menilai bahwa anggaran pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara perlu dikaji ulang terhadap strategi pemasaran yang dilakukan serta efektifitasnya. Untuk itu perlu diusulkan kembali dengan rincian program yang lebih rasional dengan rujukan yang jelas.
3. Dalam rangka meningkatkan indeks daya saing pariwisata Indonesia dan tercapainya target wisatawan mancanegara dan nusantara, Komisi X DPR RI mendesak Kemenpar RI untuk meningkatkan anggaran program pengembangan destinasi dan industri pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya:
 - a) Program pembangunan dan kegiatan daya tarik wisata (DTW) / atraksi, antara lain wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata religi.
 - b) Program pembangunan aksesibilitas meliputi sarana, prasarana, dan sistem transportasi.
 - c) Program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata / amenities.
4. Untuk mendukung tercapainya target wisman dan wisnus, peningkatan perolehan devisa negara dari sektor pariwisata, serta dalam rangka menghadapi MEA, Komisi X DPR RI mendesak Kemenpar RI agar meningkatkan anggaran yang terkait kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dengan lebih optimal, diantaranya:
 - a) dengan memberikan penguatan akses dan mutu lembaga pendidikan tinggi, yang berada di bawah Kementerian Pariwisata.
 - b) fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata melalui lembaga sertifikasi profesi.

- c) Memfasilitasi pelatihan dasar dan kompetensi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.
5. Dalam rangka penguatan pengembangan kepariwisataan, maka perlu penguatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Untuk itu Komisi X DPR RI mendukung peningkatan alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
6. Terhadap kesimpulan no.1 s.d 5 tersebut di atas, Komisi X DPR RI mendesak Kemenpar RI untuk mengajukan kembali usulan program, dan usulan anggaran RAPBN TA 2016 pada masing-masing satker di Kemenpar RI.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 20.00 WIB.

KETUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.